

1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO

: KOPERASI UMKM. PROV. NTB.
2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/INSPEKTUR PEMBANTU/WADIR RSUP/UPTD/UPTB

: BIDANG PENGAWASAN KOPERASI
3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI

: SEKSI PENGAWASAN KOPERASI
- Lampiran 14. A

NO	NAMA PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DASAR HUKUM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyuluhan Perkoperasian :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kelompok masyarakat</li> <li>- Adanya permohonan dari kelompok masyarakat untuk disuluh.</li> <li>- Koordinasi dengan kelompok yang akan disuluh.</li> <li>- Pelaksanaan penyuluhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi.</li> <li>- Daftar hadir peserta yang akan disuluh.</li> <li>- Tempat dan waktu pelaksanaan penyuluhan.</li> </ul>	-	1(satu) hari	1.UU.No.25Tahun1992TentangPerkoperasian. 2.UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 3.Perda. No. 1 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Koperasi. 4.Perda. NTB No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 5.Pergub. NTB No. 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB.	
2.	Sosialisasi Pengembangan Kader Koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identefikasi Kader dari anggota koperasi calon peserta.</li> <li>- Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se-NTB.</li> <li>- Pembentukan Panitia di tingkat Kabupaten/Kota.</li> <li>- Persiapan pelaksanaan sosialisasi oleh tim penyuluh Propinsi.</li> <li>- Pelaksanaan sosialisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya anggota koperasi yang belum memahami bagaimana berkoperasi yang baik untuk nantinya disebarkan kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.</li> <li>- Anggota Gerakan koperasi dan masyarakat pada umumnya memerlukan informasi tentang perkooperasian.</li> </ul>	-	1 (satu) hari	1. UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 2. UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 3.PP. No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. 3. Perda. No. 1 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Koperasi. 4. Perda. NTB No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 5.Pergub. NTB No. 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB.	